



DPRD Terima Usulan 11 Raperda

Minta Pemprov Masukan Kajian Teknis

PONTIANAK, TRIBUN - Pemerintah Provinsi Kalbar mengusulkan 11 raperda ke DPRD Kalbar. Hal itu disampaikan saat DPRD Kalbar menggelar rapat paripurna ke-51 di Ruang Balairung Sari Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (17/11).

Beberapa agenda yang dibahas dalam rapat tersebut, yakni penetapan keputusan DPRD Provinsi Kalbar tentang program pembentukan peraturan daerah (propem-perda) Provinsi Kalbar tahun 2023.

Menyampaikan keputusan pimpinan DPRD Provinsi Kalbar tentang persetujuan atas penyempurnaan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhadap rancangan perda Provinsi Kalbar tentang perubahan APBD

Kalau tidak ada kajian teknis, bagaimana kita mau membahas perda itu, nah itu supaya segera awal tahun 2023 ini

Prabasa Anantatur
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar

Provinsi Kalbar TA 2022. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Prabasa Anantatur mengatakan ada 11 usulan program pembentukan peraturan daerah yang diterima oleh DPRD untuk dibahas menjadi perda tahun 2023.

Meski demikian, DPRD meminta kepada pemprov untuk segera memasukan kajian teknis ke dalam usulan program pembentukan perda tahun 2023, dengan tujuan agar usulan perda tersebut bisa dibahas secepatnya.

mau membahas perda itu, nah itu supaya segera awal tahun 2023 ini (dibahas)," ujarnya saat diwawancarai usai memimpin rapat.

Dia melanjutkan, program pembentukan perda 2023 tersebut pengesahannya dilakukan sebelum APBD (anggaran pendapatan daerah) disahkan. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan dari 11 usulan hanya beberapa saja yang akan dibahas oleh DPRD.

Hal tersebut tentunya berbanding lurus dengan anggaran belanja daerah yang akan diakomodir pada tahun 2023. "Badan anggaran yang 11 ini, apakah tiga dua, atau satu belum tentu juga yang kita bahas, inikan baru usulan," ungkapnya.

Intinya kata dia, 11 usulan tersebut nantinya akan



KETERANGAN - Sekda Kalbar Harisson saat diwawancarai usai mengikuti rapat paripurna ke-51 di Ruang Balairung Sari Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (17/11).